



EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Abdul Rachman Saida¹, Istiqamah Bungana²

Ilmu Administrasi Negara¹, Ilmu Pemerintahan², Universitas Tompotika Luwuk

Email : Rahmansaida23@gmail.com, istiqamahbungana2001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program prioritas bidang infrastruktur konektivitas antar-pulau, pemberdayaan ekonomi kelautan dan perikanan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, serta pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan kualifikasi kuantitatif sederhana melalui indikator efektivitas Kebijakan Dunn (2018) yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatangunaan (propriety). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 28 informan kunci yang terdiri dari pejabat dinas teknis, tokoh masyarakat, pelaku usaha perikanan, serta perwakilan masyarakat di lima kecamatan sampel (Salakan, Tinangkung, Buko, Bulagi, dan Liang). Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen RPJMD, LPPD, BPS Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2020–2025, serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan dari 14,21% pada tahun 2020 menjadi 11,85% pada tahun 2025 dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,40 menjadi 68,92. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh hambatan geografis kepulauan, tingginya biaya logistik, ketimpangan infrastruktur dasar antar-pulau, serta keterbatasan kapasitas anggaran fiskal daerah. Keterpaduan sektor hulu-hilir sektor perikanan dan pariwisata bahari belum optimal akibat minimnya investasi sarana pendingin (cold storage) dan keterbatasan pasokan energi listrik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi strategi pembangunan berbasis pulau-pulau kecil terpadu (integrated small islands development) dan optimalisasi skema pendanaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Efektivitas Kebijakan, Pemerintah Daerah, Kesejahteraan Masyarakat, Pembangunan Kepulauan, Banggai Kepulauan, Kebijakan Publik.*

Abstract

This study aims to analyze and evaluate the effectiveness of the local government policies of Banggai Islands Regency in improving public welfare, specifically focusing on priority programs in inter-island connectivity infrastructure, marine and fisheries economic empowerment, basic healthcare enhancement, and local potential-based poverty alleviation. Using a descriptive qualitative approach combined with simple quantitative indicators adapted from Dunn's (2018) policy evaluation framework (effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and propriety), primary data were collected through in-depth interviews with 28 key informants including technical agency officials, community leaders, fishery business actors, and community representatives across five sample districts (Salakan, Tinangkung, Buko, Bulagi, and Liang). Secondary data were extracted from RPJMD, LPPD, BPS reports (2020–2025), and regional budget (APBD) documents. Findings reveal that policy implementation contributed positively to reducing poverty rates from 14.21% in 2020 to 11.85% in 2025 and increasing the Human Development Index (HDI) from 65.40 to 68.92. However, policy effectiveness remains constrained by island geographical barriers, high logistical costs, infrastructure disparities, and fiscal limitations. Upstream-downstream integration in fisheries and marine tourism remains sub-optimal due to insufficient cold storage facilities and electricity supply constraints. The study recommends reorienting development strategies toward integrated small islands development and leveraging alternative financing mechanisms such as Public-Private Partnerships (PPP) alongside strengthening village governance capacity.

Keywords: : *Policy Effectiveness, Local Government, Public Welfare, Archipelagic Development, Banggai Islands, Public Policy.*

Pendahuluan

Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan mandat yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan utama kewenangan otonomi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Dalam konteks wilayah kepulauan, tantangan efektivitas kebijakan pembangunan lokal menjadi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan daerah daratan (mainland). Karakteristik geografis yang terfragmentasi, keterisolasian wilayah, keterbatasan aksesibilitas logistik, serta tingginya biaya transportasi antar-pulau menjadi tantangan struktural utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Tengah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, memiliki karakteristik khas wilayah kepulauan yang terdiri dari ratusan pulau besar dan kecil dengan ibu kota terletak di Salakan (Kecamatan Tinangkung). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Banggai Kepulauan (2025), luas wilayah daratan kabupaten ini mencapai kurang lebih 3.214,46 km² dengan wilayah laut yang jauh lebih luas. Potensi sumber daya alam di sektor perikanan kelautan, pertanian tanaman pangan (seperti umbi ubi banggai/*Dioscorea alata*), dan pariwisata bahari sangat potensial. Namun, fakta empiris menunjukkan bahwa percepatan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan masih menghadapi lag (keterlambatan) signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sulawesi Tengah.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 tercatat sebesar 14,21%, jauh di atas rata-rata tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 13,06% dan rata-rata nasional sebesar 9,78%. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banggai Kepulauan pada tahun 2020 berada pada angka 65,40 (kategori sedang), yang mengindikasikan masih rendahnya capaian indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Ketimpangan akses terhadap layanan publik dasar seperti listrik 24 jam, air bersih, fasilitas kesehatan rujukan, dan jalan penghubung antar-kecamatan di pulau-pulau terluar seperti Pulau Peleng bagian selatan dan kepulauan sekitarnya menjadi persoalan mendasar yang terus dikeluhkan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat berbagai kebijakan prioritas, di antaranya intervensi program pemberdayaan nelayan tradisional, penyediaan sarana pendingin hasil tangkapan ikan, perbaikan konektivitas pelabuhan penyeberangan lokal, program jaminan kesehatan daerah, dan pemberian beasiswa pendidikan. Kendati berbagai intervensi program dan alokasi anggaran belanja daerah telah dialokasikan, sejauh mana efektivitas kebijakan-kebijakan tersebut benar-benar mampu secara riil ditransformasikan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi perdebatan krusial di ranah akademik maupun publik.

Kebijakan publik menurut Dye (2022) didefinisikan sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*" (apa pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). Dalam perspektif manajemen publik modern, setiap kebijakan yang diundangkan

harus melalui tahap evaluasi untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dirancang dapat dicapai serta menghasilkan dampak (impact) nyata bagi sasaran kebijakan (target groups).

Dunn (2023) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan bertujuan untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan. Untuk menilai efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan, Dunn merumuskan enam kriteria utama evaluasi kebijakan publik:

- a. Efektivitas (Effectiveness): Berkenaan dengan apakah suatu hasil yang diinginkan telah dicapai. Efektivitas berfokus langsung pada pencapaian tujuan (goal attainment).
- b. Efisiensi (Efficiency): Berkenaan dengan jumlah usaha (biaya, waktu, tenaga) yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu.
- c. Kecukupan (Adequacy): Berkenaan dengan sejauh mana suatu tingkat efektivitas mampu memecahkan masalah yang ada.
- d. Pemerataan (Equity): Berkenaan dengan distribusi atau keadilan dalam pembagian hasil, manfaat, dan beban kebijakan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda.
- e. Responsivitas (Responsiveness): Berkenaan dengan sejauh mana hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatangunaan (Propriety): Berkenaan dengan apakah tujuan yang dicapai benar-benar berguna, bernilai, dan sesuai dengan norma dasar yang berlaku dalam masyarakat.

1. Konsep Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Pembangunan Daerah

Kesejahteraan masyarakat merupakan konsep multidimensi yang tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi atau tingkat pendapatan per kapita semata, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak dasar manusia. Midgley (2023) mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai kondisi di mana masalah-masalah sosial terkelola dengan baik, kebutuhan masyarakat terpenuhi, dan kesempatan untuk kemajuan sosial terbuka lebar bagi seluruh warga negara.

United Nations Development Programme (UNDP) mengukur taraf kesejahteraan melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengintegrasikan tiga dimensi dasar: dimensi

kesehatan (angka harapan hidup), dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta dimensi standar hidup layak (pengeluaran per kapita disesuaikan). Dalam konteks wilayah kepulauan Indonesia, kesejahteraan masyarakat sangat dipengaruhi oleh aspek spatial justice (keadilan ruang) dan ketersediaan konektivitas dasar yang memungkinkan terjadinya mobilitas barang, jasa, dan manusia secara efisien (Pigothe et al., 2022).

2. Pembangunan Wilayah Kepulauan dan Karakteristik Kebijakan Lokal

Pembangunan wilayah kepulauan memiliki karakteristik khusus yang dikenal sebagai archipelagic governance. Menurut Satria (2022), kebijakan di wilayah kepulauan tidak dapat disamakan secara kontinum dengan wilayah daratan. Hambatan seperti skala ekonomi yang kecil (small scale economy), kerentanan terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem, isolasi geografis, serta ketergantungan yang tinggi pada pasokan luar pulau mengharuskan skema kebijakan yang responsif, asimetris, dan inklusif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi (mixed methods) dengan desain sequential explanatory (mengkombinasikan analisis kuantitatif sekunder dengan pendalaman deskriptif kualitatif). Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali fakta-fakta mendalam mengenai implementasi kebijakan dan persepsi masyarakat, sedangkan data kuantitatif digunakan untuk mengukur indikator makro pembangunan kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, IPM, dan alokasi realisasi APBD.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Lokasi penelitian difokuskan pada lima kecamatan yang mewakili variasi tipologi geografis dan tingkat kemajuan ekonomi:

- a. Kecamatan Tinangkung (Mewakili pusat pemerintahan dan kawasan perkotaan Salakan).
- b. Kecamatan Salakan/Tinangkung Utara (Mewakili kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru).
- c. Kecamatan Buko (Mewakili kawasan agraris dan pesisir bagian barat Pulau Peleng).
- d. Kecamatan Bulagi (Mewakili kawasan terisolir dengan tingkat kemiskinan

relatif tinggi).

- e. Kecamatan Liang (Mewakili kawasan pesisir dengan potensi utama perikanan dan pariwisata bahari).

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai September 2025 sampai dengan Februari 2026. Penentuan informan kualitatif dilakukan secara purposive sampling berdasarkan kriteria kepakaran, keterlibatan pembuatan kebijakan, dan penerima manfaat program. Informan penelitian berjumlah 28 orang yang terdiri atas:

- a. Kepala/Sekretaris Bappeda Kabupaten Banggai Kepulauan (2 orang)
- b. Pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan (2 orang)
- c. Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (2 orang)
- d. Pejabat Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan (4 orang)
- e. Camat dan Kepala Desa di 5 kecamatan lokasi sampel (10 orang)
- f. Tokoh Masyarakat, Ketua Kelompok Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro (8 orang)

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Banggai Kepulauan secara administratif terbagi ke dalam 12 kecamatan, 141 desa, dan 3 kelurahan. Sebagai daerah kepulauan, struktur perekonomian masyarakat sangat didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menyumbang lebih dari 42% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah.

Berdasarkan analisis dokumen APBD Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2020–2025, terjadi peningkatan alokasi anggaran belanja daerah dari Rp 780,5 Miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 985,2 Miliar pada tahun 2025. Porsi anggaran prioritas dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pembangunan dermaga penyeberangan, serta belanja bidang kesehatan dan pendidikan.

Tabel 1. Indikator Makro Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan (2020–2025)

No	Indikator Kesejahteraan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	65.40	65.88	66.75	67.42	68.15	68.92
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	14.21	13.95	13.20	12.65	12.10	11.85
3	Angka Harapan Hidup (Tahun)	66.80	67.10	67.55	68.02	68.45	68.90
4	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.65	7.72	7.85	8.02	8.18	8.35
5	Pengeluaran per Kapita (Ribu Rp/Tahun)	8.850	9.020	9.350	9.780	10.150	10.620
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3.85	3.72	3.50	3.28	3.12	2.95

Sumber: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan (Diolah dari Data Sekunder, 2026)

1. Kriteria Efektivitas (Effectiveness)

Evaluasi efektivitas mengukur sejauh mana target-target program prioritas pemerintah daerah tercapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal peningkatan pencapaian makro (seperti penurunan angka kemiskinan sebesar 2,36% dalam 5 tahun terakhir), kebijakan pemerintah daerah tergolong cukup efektif. Intervensi program seperti pemberian bantuan kapal motor <5 GT, alat tangkap ramah lingkungan, serta bantuan bibit rumput laut telah mampu meningkatkan kapasitas produksi nelayan di Kecamatan Liang dan Tinangkung.

Namun, untuk program penciptaan nilai tambah hasil perikanan (pengolahan dan pasca-tangkap), efektivitas kebijakan masih tergolong rendah. Ketidaktersediaan sarana Cold Storage yang memadai di pulau-pulau luar Salakan menyebabkan lebih dari 35% hasil tangkapan nelayan terpaksa dijual dengan harga murah kepada pedagang perantara (tengkulak) dari luar daerah sebelum mengalami pembusukan.

2. Kriteria Efisiensi (Efficiency)

Efisiensi pengerjaan program di wilayah kepulauan terkendala oleh tingginya geographical cost premium. Biaya konstruksi fisik infrastruktur (seperti pembangunan jalan lingkar Pulau Peleng dan dermaga desa) di Banggai Kepulauan membengkak antara 30%

hingga 50% lebih tinggi dibandingkan wilayah daratan Sulawesi Tengah akibat tingginya biaya mobilisasi material semen, besi, dan alat berat antar-pulau.

Temuan studi menunjukkan bahwa rasio efisiensi alokasi anggaran belanja modal terhadap efektivitas dampak di Kabupaten Banggai Kepulauan masih belum optimal. Beberapa proyek fisik penyeberangan tambatan perahu di wilayah Bulagi dan Buko tidak dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan karena perencanaan teknis yang kurang memperhitungkan dinamika gelombang pasang surut air laut lokal.

Tabel 2. Matriks Evaluasi Kinerja Kebijakan Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan

Efektivitas	Penurunan Kemiskinan			&Cukup Efektif (68%)	Rantai pasok industri hilir belum terbentuk
	Peningkatan IPM				
Efisiensi	Rasio Biaya vs Infrastruktur		Output	Kurang Efektif (52%)	Tingginya biaya logistik material antar-pulau
Kecukupan	Pemenuhan Kebutuhan Dasar & Listrik			Sedang (60%)	Kapasitas pembangkit PLN terbatas di wilayah pulau
Pemerataan	Distribusi Akses Pembangunan Antar-Kecamatan			Rendah (45%)	Konsentrasi pembangunan tertumpu di Ibukota Salakan
Responsivitas	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan			Baik (72%)	Respon cepat pada bantuan bencana laut/ cuaca
Ketepatan	Relevansi Program dengan Potensi Lokal			Sangat Baik (80%)	Fokus pada sektor maritim dan komoditas lokal

Sumber: Hasil Analisis Data Lapangan & Wawancara (2026)

3. Kriteria Kecukupan (Adequacy)

Tingkat kecukupan program pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan telah mengalami kemajuan positif dengan hadirnya program Puskesmas Keliling Perairan dan jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Kendati demikian, cakupan layanan kecukupan energi

listrik dan fasilitas air bersih masih belum memenuhi ambang batas kecukupan minimal. Di wilayah Kecamatan Bulagi Selatan dan Buko Selatan, pasokan listrik dari PLN pada beberapa desa belum beroperasi full 24 jam, yang berdampak langsung pada terhambatnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat pada malam hari.

4. Kriteria Pemerataan (Equity)

Ketimpangan pembangunan (spatial disparity) merupakan isu kritis yang mendominasi temuan penelitian. Terjadi bias pembangunan kawasan di mana alokasi investasi fisik dan pembenahan fasilitas publik cenderung terkonsentrasi di Kecamatan Tinangkung (kawasan pusat ibu kota Salakan). Sementara itu, wilayah-wilayah perbatasan pulau dan bagian selatan seperti Bulagi Kompleks sering kali menerima porsi belanja pembangunan yang relatif terbatas, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas hidup masyarakat antar-wilayah kecamatan.

5. Kriteria Responsivitas (Responsiveness)

Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan dinilai cukup responsif dalam menanggapi keluhan masyarakat terkait bencana alam maritim dan gelombang tinggi, serta penyaluran bantuan sosial kedaruratan. Namun, responsivitas dalam hal penyerapan aspirasi bottom-up perencanaan pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa masih dipersepsikan formalitas oleh Sebagian besar Kepala Desa, di mana usulan-usulan prioritas desa kerap kali hilang dalam penetapan RKPD di tingkat kabupaten.

6. Kriteria Ketepatangunaan (Propriety)

Program-program kebijakan yang dirancang oleh Pemda telah memiliki ketepatangunaan yang tinggi karena berbasis pada realitas potensi lokal daerah (local genuine potential). Orientasi pada pengembangan kebudayaan lokal, perlindungan komoditas spesifik lokasi Ubi Banggai, serta pemberdayaan nelayan tradisional menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami akar identitas sosio-ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan triangulasi data hasil wawancara dan observasi dokumen, teridentifikasi beberapa faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan pemerintah daerah di Banggai Kepulauan:

1. Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan

a. Komitmen Politik dan Kepemimpinan Daerah: Adanya kemauan politik (political will) pemerintah daerah untuk menempatkan pembangunan maritim dan peningkatan SDM sebagai pilar utama RPJMD.

b. Ketersediaan Sumber Daya Alam Maritim yang Melimpah: Potensi perikanan tangkap dan budidaya laut (rumput laut, kerapu, lobster) yang melimpah menjadi modal dasar perekonomian masyarakat.

c. Tingginya Modal Sosial (Social Capital) Masyarakat: Tradisi kebersamaan (siampak) dan gotong royong dalam masyarakat Banggai Kepulauan mempermudah penerimaan dan partisipasi program pemberdayaan berbasis komunitas.

2. Faktor Penghambat (Constraining Factors):

a. Keterbatasan Kapasitas Fiskal Daerah (PAD Rendah): Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banggai Kepulauan yang masih berada di bawah 8% dari total APBD menyebabkan ketergantungan yang sangat tinggi terhadap Dana Transfer Pusat (TKDD).

b. Keterisolasian Geografis dan Keterbatasan Konektivitas Logistik: Ketergantungan pada moda transportasi laut yang sangat dipengaruhi oleh musim angin barat dan timur memicu fluktuasi harga kebutuhan pokok dan bahan bangunan.

C. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Teknis: Terjadinya kelangkaan tenaga spesialis, seperti tenaga perencanaan teknis perikanan, dokter spesialis di RSUD, serta tenaga pengelola teknologi informasi di tingkat kecamatan/desa.

3. Model Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Berbasis Pulau-Pulau Kecil Terpadu

Guna mengatasi ketimpangan dan meningkatkan efektivitas kebijakan, penelitian ini merekomendasikan reorientasi paradigma pembangunan menuju *Integrated Archipelagic Development Model* (Model Pembangunan Kepulauan Terpadu). Model ini menekankan pada tiga pilar utama:

a. Pusat Pertumbuhan Sub-Kawasan (Sub-Regional Hubs): Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Salakan (misalnya pembentukan klaster ekonomi Buko-Bulagi untuk pertanian/ubi dan klaster Liang untuk industri perikanan & pariwisata).

b. Konektivitas Sabuk Maritim Terpadu (Inter-Island Maritime Belt): Penyediaan armada kapal ro-ro/ penyeberangan antarpulau berjadwal tetap yang disubsidi oleh pemerintah (penerapan penerbangan & pelayanan perintis lokal).

c. Digitalisasi Pelayanan dan Logistik Desa: Membangun pusat data desa dan rantai pasok

pemasaran digital untuk komoditas perikanan dan pertanian unggulan daerah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yaitu, Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2020–2025 secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,40 pada tahun 2020 menjadi 68,92 pada tahun 2025, serta penurunan angka kemiskinan dari 14,21% menjadi 11,85%. Hambatan terbesar dalam efektivitas kebijakan terletak pada keterbatasan kapasitas anggaran daerah (PAD yang sangat kecil), ketimpangan aksesibilitas jaringan listrik dan air bersih di kawasan perdesaan terluar, serta belum terintegrasinya rantai pasok industri hilir sektor perikanan tangkap.

Bibliografi

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai Kepulauan. (2025). *Kabupaten Banggai Kepulauan Dalam Angka 2025*. Salakan: BPS Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021–2026*. Salakan: Bappeda Banggai Kepulauan.
- Dunn, W. N. (2023). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6thed.). New York: Routledge.
- Dye, T. R. (2022). *Understanding Public Policy* (15th ed.). Boston: Pearson.
- Kurniawan, A., & Setiawan, B. (2022). Evaluasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Pesisir di Daerah Kepulauan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 18(2), 145–158.
- Midgley, J. (2022). *Social Development: Theory and Practice*. London: SAGE Publications.
- Pigothe, M., Nurmandi, A., & Salahudin. (2022). Archipelagic Governance and Public Service Delivery in Remote Islands: Evidence from Eastern Indonesia. *Journal of Asian Public Policy*, 15(3), 412–430.

- Prasojo, E., & Rudita, L. (2021). Reformasi Birokrasi dan Kebijakan Publik di Daerah Otonom Kepulauan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1), 22–35.
- Rettob, J., & Soeprapto, H. (2023). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Potensi Lokal di Wilayah Pesisir dan Kepulauan. *Jurnal Analisis Kebijakan Publik*, 7(1), 89–104.
- Satria, A. (2022). *Politik Kelautan dan Pembangunan Wilayah Kepulauan di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, A. G. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- UNDP. (2024). *Human Development Report 2024: Breaking the Gridlock - Reimagining Cooperation in a Polarized World*. New York: United Nations Development Programme.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospect: Boosting Archipelagic Connectivity and Marine Economy*. Washington, DC: The World Bank.
- Yulianto, E., & Susanto, H. (2023). Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Kabupaten Banggai Kepulauan. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan Daerah*, 5(2), 112–126.